



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan - Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5705087, 5730343 Fax. (021) 5705087 Telex : 48228 PRX IA

Nomor : S. 60 / 102en / 14ves / PHS / Was / 07 / 2020

13 Juli 2020

Lampiran : -

Hal : Pengusulan Unit Kerja Layanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
di

Jakarta

Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2020 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) ZI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami mengusulkan:

1. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
2. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
3. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
4. Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat;
5. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
6. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim;
7. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM;
8. BPKH Wilayah XI Yogyakarta;
9. BPKH Wilayah III Pontianak;
10. Balai Taman Nasional Alas Purwo;
11. Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Samarinda;
12. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru;
13. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan;
14. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi SDA.

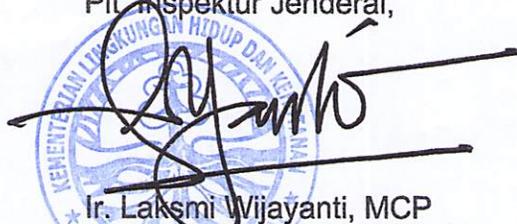
sebagai Calon Unit Kerja Layanan berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

/Sehubungan...

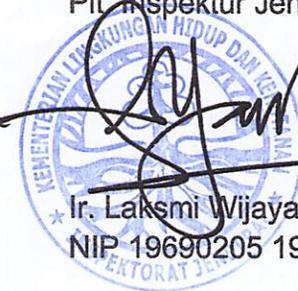
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Tim Penilai Nasional (TPN) dapat melakukan evaluasi atas Unit Kerja Layanan yang diusulkan tersebut.

Demikian Surat Pengusulan Unit Kerja Layanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, MCP
NIP 19690205 199503 2 001



Tembusan :
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan